



2025

RANCANGAN AKHIR **RENJA** **BADAN KESBANGPOL** **KAB. KUTAI KARTANEGARA**



Badan Kesbangpol
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Awang. Sabran Bc.Hk No.63 Telp.(0541) 661518, Fax.(0541) 662602
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : SK-33/BKBP/SET-II/800/01/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah :
1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan dan merumuskan program renja;
 3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renja;
 4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
 5. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 6. Melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 19 Januari 2024

Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : SK-33/BKBP/SET-II/800/01/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3	Perencana Ahli Muda	Ketua	
4	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid. Ket. Ekososbud	Anggota	
6	Kabid. Idiologi dan Wasbang	Anggota	
7	Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
8	Analisis Kebijakan (Sub Ketahanan Sosbud)	Anggota	
9	Analisis Kebijakan (Sub Idiologi dan Kewaspadaan)	Anggota	
10	Analisis Kebijakan (Sub Fasilitasi Ormas)	Anggota	
11	Darmadian Nur	Anggota	
12	Irhamni,S.IP	Anggota	
13	Zaini Ma'ruf	Anggota	
14	Juminah.HR	Anggota	
15	Yeni	Anggota	

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 19 Januari 2024

Kepala Badan,



RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan hingga sub kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa *input*, *output*, dan *outcome* dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang optimal dan terorganisasi.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	82
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	99
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	103
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	104
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	104
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	107
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	111
4.1 Program dan Kegiatan	111
BAB V PENUTUP	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada tahun 2025 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2025 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024, Pelaksanaan tugas Paskibraka, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Forum-Forum Bentuk Pemerintah, Fasilitasi Pelaksanaan P4GN serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang berfokus kepada Pemberdayaan Masyarakat dengan tema pembangunan **“Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”** dengan prioritas dan focus pembangunan sebagai berikut :

1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
 - Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Produktif, Terampil
 - Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
 - Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
3. Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pembangunan Desa
 - Penguatan Kecamatan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Kawasan Startegis Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja
 - Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda.
5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan
 - Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial Budaya dan olah raga berkelanjutan.
 - Peningkatan Produktivitas Industri Kreatif
6. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN
 - Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Tentang Ormas;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
15. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum



Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Laludan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Tantangan dan peluang dalam



meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2021-2026, pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesbangpol bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database ormas dan parpol. Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,50	41,85	67,32%	Hasil Penilaian Mandiri, sambil hasil penilaian dari inspektorat
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	25	14	132%	merupakan angka capaian penurunan jumlah konflik dan gejolak
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	2,99	3,99	133,44%	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik dan jumlah peserta melebihi dari target renstra
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	4,5	5,71	126,89%	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejolak masyarakat dan kejadian konflik pada tahun 2023 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan situasi di Kutai Kartanegara kondusif
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki	1,21%	1,77%	146%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2023	% PENC.	KETERANGAN
	pemahaman ketahanan ekososbud				yang melebihi target.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62 %	14,76 %	127%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%	9,8%	98,99%	Dari target 25 ormas telah terpenuhinya 21 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 nilai	95,20 nilai	109	Nilai SAKIP hasil revidi Tahun 2022

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023, dengan perhitungan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja realisasinya melebihi target sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target sasaran, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,99 % dan realisasi keuangan sebesar 93,28 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian target renja dan renstra yang tercapai, tidak tercapai dan melebihi target serta faktor-faktor penyebab dan tindak lanjut



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

terhadap capaian target program dan kegiatan pada tahun 2023, secara keseluruhan disampaikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	87	95,20	109	Adanya perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya	Reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	900	900	100	Terdapat ASN yang pensiun dan meninggal serta pindah tugas	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan	Kepatuhan SOP



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
							pelaporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tertibnya pelaporan data dan kepangkatan ASN Kesbangpol	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	195	189	96,92	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	25	33,33	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	100	Tertibnya pelaksanaan layanan	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	29	29	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	19	19	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	5	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	600	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.220	2.220	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	170	170	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85	85	Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap	Proses pemenuhan kelengkapan administrasi barang



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	30	15	50	Sebagian kendaraan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional kendaraan secara berkala
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	40	3	7,50	Kelengkapan surat kendaraan untuk pengurusan belum ditemukan	Pengusulan kemudahan administrasi pada Samsat untuk kendaraan dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	43	35	81,40	Sebagian peralatan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional peralatan secara berkala
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persen	1,78	2,19	123	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.800	1.800	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	400	400	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Ika dan Sejarah Kebangsaan					dipahami dengan baik	
III	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persen	11,62	14,76	127	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparatur dan masyarakat
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dok/Blh	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5.400	5.400	100	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta serta lokasi pelaksanaan bisa menjangkau daerah pedesaan dan pemukiman perusahaan
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30	30	100	Parpol telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah menyelesaikan pertanggung jawaban	Peningkatan kapasitas dan pemahaman partai politik terhadap peningkatan pendidikan politik
		Pelaksanaan Monitoring,	Laporan	48	28	58,33	Pelaksanaan	Diperlukan upaya



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					monev telah dilaksanakan	peningkatan analisis pelaporan perkembangan politik
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persen	9,9	9,8	99	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20	20	100	Dokumen sesuai dengan jumlah dokumen ormas yang terregistrasi	Diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan keberadaan ormas
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	75	60	80	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persen	1,21	1,77	146	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Dok/Tri	5	5	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	3.000	2.546	84,87	Sikap apatis masyarakat terhadap ketahanan ekososbud dan belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pemahaman ketahanan ekososbud kepada aparat dan masyarakat
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	22	22	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan ketahanan ekososbud
VI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persen	100	100	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen ketahanan ekonomi
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Orang	500	500	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum	Diperlukan analisis yang lebih detail terhadap hasil deteksi dini yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan selanjutnya



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2023				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Penanganan Konflik di Daerah					bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35	70	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forkopimda	Peningkatan jalin koordinasi antar instansi vertikal

Dalam tahun 2023 pencapaian program kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, tentunya memiliki implikasi terhadap target capaian pada rencana strategis Badan Kesbangpol, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh program hanya terdapat 1 program yang tidak mencapai target, sehingga akan menghambat pencapaian pada akhir renstra
2. Pada program lainnya capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja
3. Secara keseluruhan pada capaian renstra masih baik, karena masih berada pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya pencapaian target
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2023 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Pada program ini dilakukan pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan Jejaring Panca Mandala dan persiapan Paskibraka serta pemberian hibah uang kepada ormas Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pagu kegiatan ini mengalami pergeseran dan penambahan terkait untuk keperluan Fasilitasi KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan workshop teknis penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan tahapan pemilu 2024 dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan



kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara serta hibah kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah tahun 2024

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pada program ini dilakukan pergeseran pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan fasilitasi Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis dan pelaksanaan rakor FKUB se-Kaltim serta pembelian test kit narkoba.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja untuk keperluan pelaksanaan hari bela negara 2023 dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota FKDM kabupaten kutai kartanegara serta sosialisasi pencegahan radikalisme bersama MUI dan Kemenag.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL s/d TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
							1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4x100	
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Nilai	86,16	Nilai	87	Nilai	95,2	Nilai	109,43	persen	88	Nilai	95,2	Nilai	105,78	persen
8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	persen	6	dokumen	18	dokumen	60	persen
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	9	dokumen	60	persen
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	9	laporan	60	persen
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	laporan	20	laporan	20	laporan	20	laporan	100	persen	20	laporan	60	laporan	60	persen
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	900	orang/bulan	836	orang/bulan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100,00	persen	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100	persen
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	persen	1	laporan	3	laporan	60	persen
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	90	laporan	18	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	18	laporan	54	laporan	60	persen
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	9	dokumen	60	persen
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	9	laporan	60	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024				
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	persen	4	dokumen	12	dokumen	60	persen
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	orang	75	orang	75	orang	25	orang	33,33	persen	75	orang	175	orang	46,66667	persen
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	layanan	6	layanan	6	layanan	6	layanan	100	persen	6	layanan	18	layanan	60,00	persen
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	paket	4	paket	5	paket	5	paket	100	persen	4	paket	13	paket	65	persen
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	145	paket	33	paket	29	paket	29	paket	100	persen	29	paket	91	paket	62,75862	persen
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	152	paket	19	paket	19	paket	19	paket	100	persen	38	paket	76	paket	50,00	persen
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	21	paket	8	paket	5	paket	5	paket	100	persen	6	paket	19	paket	90,48	persen
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1175	laporan	300	laporan	600	laporan	600	laporan	100,00	persen	600	laporan	1500	laporan	127,66	persen
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	11940	dokumen	2220	dokumen	2220	dokumen	2220	dokumen	100,00	persen	2500	dokumen	6940	dokumen	58,12	persen
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	37	unit	35	unit	170	unit	170	unit	100,00	persen	42	unit	247	unit	667,5676	persen
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	laporan	0	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
4	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	persen	12	laporan	12	laporan	100	persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30	unit	26	unit	30	unit	15	unit	50,00	persen	20	unit	30	unit	100	persen
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	40	unit	26	unit	40	unit	3	unit	7,50	persen	45	unit	40	unit	100	persen
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43	unit	38	unit	43	unit	35	unit	81,40	persen	43	unit	43	unit	100	persen
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	100	persen	3	unit gedung	2	unit gedung	100	persen
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34	Persen	1,64	Persen	1,78	Persen	2,19	Persen	123,03	persen	1,99	Persen	2,19	Persen	93,59	persen
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2550	orang	750	orang	1800	orang	1800	orang	100,00	persen	3500	orang	6050	orang	237,25	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
4	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2000	orang	400	orang	400	orang	400	orang	100,00	persen	1000	orang	1800	orang	90	persen
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75	Persen	11,9	Persen	11,62	Persen	14,76	Persen	127,02	persen	14,27	Persen	14,76	Persen	100,07	persen
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	7020	orang	1621	orang	5400	orang	5400	orang	100	persen	5500	orang	12521	orang	178,36	persen
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan monev bankeu parpol	16	orang	16	orang	30	orang	30	orang	100	persen	48	orang	30	orang	187,5	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
4	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	270	Laporan	24	Laporan	48	Laporan	28	Laporan	58,33	persen	700	Laporan	752	Laporan	278,52	persen
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,4	Persen	8,8	Persen	9,9	Persen	9,8	Persen	98,99	persen	11,4	Persen	9,8	Persen	68,06	persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130	dokumen	17	dokumen	20	dokumen	20	dokumen	100,00	persen	30	dokumen	67	dokumen	51,54	persen
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	145	orang	17	orang	75	orang	60	orang	80,00	persen	300	orang	377	orang	260,00	persen
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58	Persen	1,25	Persen	1,21	Persen	1,77	Persen	146,28	persen	1,33	Persen	1,77	Persen	112,03	persen
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	25	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	5	dokumen/triwulan	100	persen	5	dokumen/triwulan	15	dokumen/triwulan	60	persen
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Pyenyuluhan	3000	orang	1387	orang	3000	orang	2546	orang	84,87	persen	1400	orang	5333	orang	177,77	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2024			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
			4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud	98	laporan	22	laporan	22	laporan	22	laporan	100	persen	22	laporan	66	laporan	67,35	persen
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	persen
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	36	dokumen/bulan	60	persen
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	1550	orang	350	orang	500	orang	500	orang	100	persen	1000	orang	1850	orang	119,35	persen
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda	250	dokumen	50	dokumen	50	dokumen	35	dokumen	70,00	persen	50	dokumen	135	dokumen	54,00	persen

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran
Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	77,83	86,16	95,20

Dari indikator tersebut diatas, bahwa setiap tahun hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, berikut analisis dari indikator tersebut :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

a. Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	29 jenis	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40 unit	3 unit	7,50%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	25 orang	33,33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	35 unit	81,40%



Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran.
3. Dalam Penataan Arsip Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun 2023 telah terpenuhi. Dan pada tahun 2024 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Pengadaan dan Pemeliharaan BMD

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	6	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Kaca	2	2013	Baik



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

6	Penghancur Kertas	2	2014	Baik
7	Papant Tulis	1	2013	Baik
8	AC	30	2014	Baik
9	Televisi	14	2013	Baik
10	Sound System	1	2013	Baik
11	Dispenser	8	2013	Baik
12	CCTV	4	2013	Baik
13	PC	20	2014	Baik
14	Printer	20	2014	Baik
15	UPS	10	2014	Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada tahun 2023 tidak banyak mengalami perubahan karena Pada tahun 2023 pelaksanaan pengadaan keperluan Badan Kesbangpol telah terpenuhi.

c. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan BMD

Pengelolaan aset BMD dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaanya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan BMD

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan BMD sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Laporan BMD yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen Laporan BMD Semesteran
2. 1 (satu) dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

d. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran



ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (cash flow)

Pada awal tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 350.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolving atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :



- 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

e. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 tahunan ke perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja

Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

a. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2023 dan juga untuk tahun 2024 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2023 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan revidi oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk



setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau.

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah dibuat RENJA 2024, LKjIP 2022, LPPD 2022 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2023 baik secara manual baik melalui aplikasi E – PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2023 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2023 terdapat 31 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2022 sebesar 100%, dan di tahun 2023 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%



Tujuan 2 :

Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari indikator tersebut :

Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti

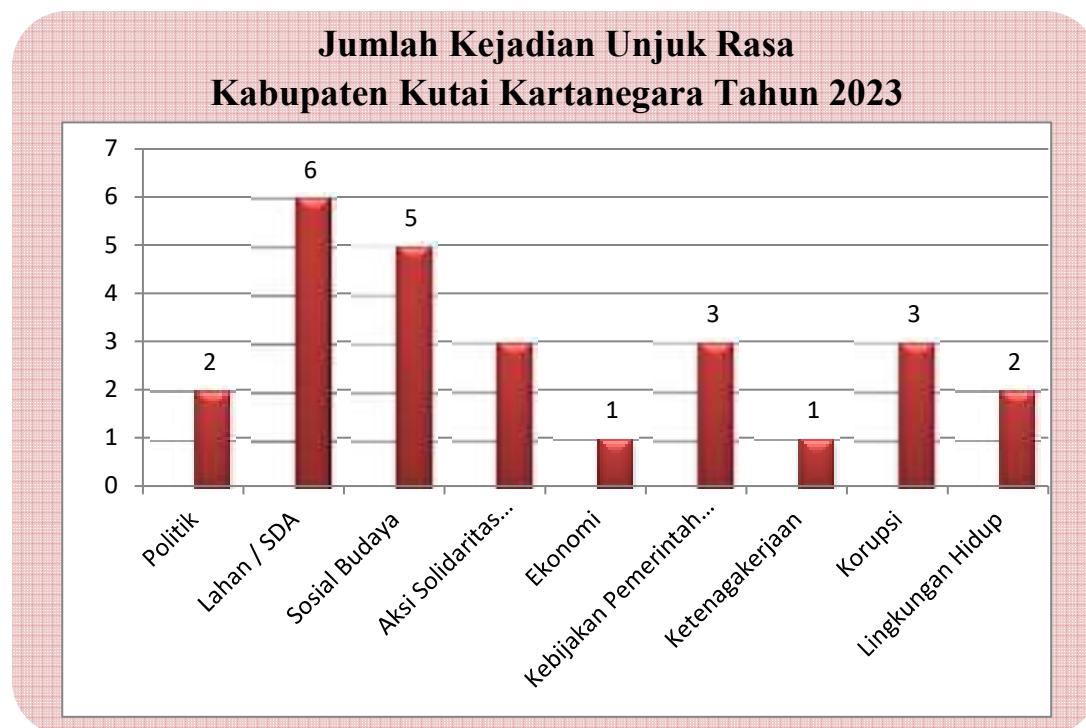
Untuk capaian indikator Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :



a. Data Gangguan dan Konflik

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2023 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2022.

Pada tahun 2023 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 26 kali aksi, sedangkan pada tahun 2022 aksi unjukrasa sebanyak 40 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Kebijakan Pemerintah, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalanan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2023.





RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik	1							1					2
2	Lahan / SDA	1			1				1			1	2	6
3	Sosial Budaya	1			1	1			1		1			5
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional		1			1			1					3
5	Ekonomi	1												1
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik							2	1					3
7	Ketenagakerjaan							1						1
8	Korupsi			1			1				1			3
9	Lingkungan Hidup		1				1							2
Jumlah Unjuk Rasa		4	2	1	2	2	2	3	5	0	2	1	2	26

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)	1		1	1	1	1	1	3					9
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masy.)										1			1
3	Ormas / LSM	1	1	1			1	1	1		1			7
4	Elemen Masyarakat	2	1			1						1	2	7
5	Karyawan / Sarikat Pekerja							1	2					2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa		4	2	2	1	2	2	3	6	0	2	1	2	26



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha						1							1
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh													
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat													
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

A. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan



penyediaan data dan informasi aktual serta akurat. Sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sebagai leading sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan di daerah yaitu dengan dibentuknya:

1. Nama Forum : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum :
 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.



4. Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah.
5. Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di daerah.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan



- Tujuan
- Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- : 1. Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukarkan data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara bersama menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis.
3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen.
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan



acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di daerah.

5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan

- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2)
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3)
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1)
 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
 6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;



10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR;
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;
15. Kasi Intel Kejaksaa Negeri Kutai Kartanegara;
16. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;



22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nama Forum : **Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.**

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
 4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 367/SK-BUP/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Tujuan	1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten; 2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya; 3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; 4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik; 5. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan; 6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
Keanggotaan	1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua) 2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 1); 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 2); 4. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3); 5. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4); 6. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5); 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris); 8. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1); 9. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2);



10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;



22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Sub Bidang Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa Poltik Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kegiatan – Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan No. 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pertukaran informasi kewaspadaan secara dini.

Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
Jenis Kegiatan	: 1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 Kecamatan. 2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus. 3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah. 4. Pembuatan analisis dan rekomendasi (problem solving) atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada



pimpinan daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut.

5. Pembentukan Anggota Jaring Kominda di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat)

Koordinasi yang dilakukan oleh kominda dilakukan setiap bulan dan minimal setiap tiga bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota Jaring Agen Kominda di Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil Rapat Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis.

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 197/SK-BUP/HK/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;



- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
- g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD sebagai dalam kegiatan :

- 1. Pencegahan Konflik;
- 2. Penghentian / Penyelesaian Konflik
- 3. Pemulihan Pasca Konflik.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Ketiga, Penyusunan dan Pembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi.

RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

A. PENCEGAHAN

1. Konflik Sosial

- a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)
- b. SARA (2 RA)
- c. Politik (1 RA)
- d. Ekonomi / Industrial (1 RA)

2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME

1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)

2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme

- a. Sebelum Tahun 2023 (1 RA)
- b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM

- a. Sebelum Tahun 2023 (2 RA)
- b. Sejak Tahun 2023 (2 RA)

D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)

E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 (1 RA)



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Pada tahun 2013 – 2014 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload (entry data) melalui website Serambi UKP4 : <http://serambi.ukp.go.id>. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.

Mulai tahun 2015 hingga tahun 2023 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12.

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	Masa Pelaporan	Evaluasi Timdu Pusat
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2023	5 Juni 2023
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2023	8 September 2023
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2023	10 Januari 2024



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Pada Tahun 2023 pelaporan progress capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital Google Drive yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital Google Drive Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Jenis Kegiatan : 1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 18 Kecamatan.
2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadian konflik.



3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul.
5. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di daerah sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuran realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2023 :

Isu Strategis dan Permasalahan Aktual berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Ideologi	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	• Jumlah pengikut $\pm$ 70-80 orang • Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.
	2. Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin"	Jahab, Tenggarong	Jumlah pengikut $\pm$ 20-50 orang
	3. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	• Jumlah pengikut $\pm$ 40-100 orang • Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" • Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. • Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
			Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Politik	Suksesi Pimpinan dan pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024	Kabupaten Kutai Kartanegara	- Adanya upaya menguasai pucuk pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. - Membangun kekuatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024.
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfatan koridor batubara (eks Tambang)	Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	- Penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling menuju stock file yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak - Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan
Sosial Budaya	Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	- Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik - Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/pengusaha untuk mengintimidasi pihak



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
			lain • Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan
Hankam	Penyebaran faham radikal dan terorisme	Kecamatan di daerah Pesisir	• Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 • Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011 • Simpatisan kelompok radikal kanan
		Tenggarong, Loa Duri dan Loa Janan	• Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) narapidana teroris yang akan berakhir masa pidananya dan akan kembali kepada masyarakat, sehingga perlun pengawasan dari pihak terkait. • Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara

b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam,



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2023 :

NO.	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
1	Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin Kelompok Khilafatul Muslimin di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong membangun pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah, dimana Ponpes ini tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara, hal ini yang menjadikan alasan bagi warga untuk menolak keberadaan Ponpes ini, dimana Ponpes ini merupakan lembaga pendidikan sayap dari Kelompok Khilafatul Muslimin yang mengusung sistem Kekhaliifahan dan tidak mengakui pemerintah.	1	1. Melakukan koordinasi dengan kelurahan Jahab untuk melakukan pendataan 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual. 3. Mendorong Kantor Kemenag Kukar melakukan pembinaan dan proses legalitas perizinan Pondok Pesantren. 4. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini pada 6-2-2022 5. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 14-2-2023 yang dipimpin Asisten I 6. Rapat Penangan Konflik Sosial pada 17-2-2023 di Ruang Sekda



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

2	Konflik Lahan ahli waris A.P. Sosro Negoro dengan PT. MHU aksi penutupan jalan houling PT. Multi Harapan Utama oleh ahli waris A.P. Sosro Negoro, meminta kompensasi atas lahan yang digunakan oleh PT. MHU dengan klaim lahan seluas 1,300 meter.(09/01/2023) Permasalahan yang sudah berjalan selama 9 tahun ini, sejatinya sudah mendapat angin segar dari pihak-pihak terkait salah satunya dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ini pada tahun 2019 yang mengintruksikan pihak perusahaan bersama ahli waris dapat bekerja sama. Namun hingga saat ini pihak ahli waris justru tidak mendapatkan apa-apa. Dari data terdahulu sejatinya kepemilikan lahan seluas 105.000 hektar yang diakui oleh para ahli waris pada tahun 1899 dan ditulis langsung oleh Adji Muhammad Sultan Sulaiman. Hal ini juga diakui oleh Mentri Dalam Negeri Pada Tanggal 30 Juni 1977.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penutupan jalan houling. 2. mendorong dilakukannya negoisasi untuk membuka jalan agar perusahaan kembali bisa beroperasi. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
3	Penghentian Kegiatan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) di STS Muara Berau oleh Himpunan Nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Muara Badak Kelompok nelayan meminta PT PTB akan menghentikan kegiatan karena PT. PTB tidak memiliki Dokumen perijinan amdal floating crane PT. PTB. Nelayan menuntut PT. PTB dan memberikan ganti rugi dan CSR kepada nelayan	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik jalan aksi penghentian operasional PT. PTB. 2. mendorong dilakukannya negoisasi antara kelompok nelayan dan PT. PTB. 3. melakukan koordinasi untuk meneruskan tuntutan kepada pihak terkait 4. meminta pihak kecamatan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak (19-1-2023) 5.Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

4.	Penanganan Konflik warga Muara Badak Ulu dengan PT. Sawit Unggul Agro Niaga (SUAN) terkait dugaan adanya pencemaran lingkungan milik warga Tanggal 13 Februari 2023 Pukul 11.00 pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Camat Muara Badak Arpan S,Sos, Kasi trantib Kantor Camat (Nursidik SH), Dan Ramil Muara Badak (Kapten Rukito), Mewakili Kapolsek (Bpk Iptu Lamser L), Aipda Kukuh DK (Kanit Intelkam Polsek Muara Badak) BLHD Kabupaten Kukar (Pramu Wisnu), Kepala Desa Muara Badak(Ruslan E.). Selajutnya di adakan pertemuan/Mediasi di Kantor PT.SUAN Setelah Itu Kelapangan bersama sama Tim dari DLHD Bersama Muspika Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar untuk menentukan ada pencemaran atau tidak sampai pengambilan Titik Koordinat Tanah yang dianggap kena pencemaran	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik 2. mendorong dilakukannya mediasi antara kelompok warga dan PT. SUAN. 3. meminta Dinas Lingkungan Hidup Daerah, untuk melakukan pengecekan lapangan, mengenai titik koordinat lokasi dugan pencemaran
5	Konflik Penolakan Tambang Ilegal di Ioa Kulu (Desa Rempanga) yang sampai terjadi pertikaian antar warga dan Preman tambang batubara ilegal Daniel Mahendra Yuniar, 41 tahun, berdiskusi bersama 18 warga. Pertemuan di antara rintik hujan itu menghasilkan keputusan penting. Mereka akan memblokade jalur truk angkutan batu bara (hauling). Malam itu juga. Daniel dan warga sudah jemu dengan dampak hauling bagi permukiman. 1 April 2023, sekitar pukul 01.00 Wita, jalur angkut batu bara di Desa Rempanga,	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan pengamanan dan melokalisasi tempat perkara untuk mengantisipasi konflik berlanjut. 2. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

	Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, akhirnya ditutup. Warga memarkir sebuah mobil putih bernomor polisi KT 1077 CZ di tengah jalan. Akses menuju tempat penumpukan (stock pile) dan pemuatan (loading) batu bara di tepi Sungai Mahakam terkunci. Belasan dump truck bermuatan batu bara yang diduga diangkut dari tambang ilegal akhirnya tak bergerak. Tiba-tiba, seorang pria gempal yang mengenakan kaus hitam berteriak. Ia memukul kendaraan yang tadi digunakan untuk menutup jalan. Tak lama kemudian, pria tersebut mengeluarkan sebilah pisau dan berusaha menikam seseorang yang tak jauh darinya. beruntung warga cepat melarikan diri		
6	Aksi protes warga RT. 16 Desa Prangat Selatan dan RT 16 Sambera Baru kepada pihak PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line. Warga protes PHSS terkait Kegiatan project pemasangan pipa flow Line tipe 6" yang dikerjakan oleh PT. PTM (Kontraktor PHSS). Dimana jaringan pipa menghalangi akses menuju mushola. Selasa tanggal 9 Mei 2023, pukul 09.00 Wita menghentikan pekerjaan pemasangan pipa tersebut.	1	melakukan koordinasi dan meminta kepada pemerintah kecamatan, desa dibantu Babinnsa dan Babhinkamtibmas untuk mengamankan keadaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Serta agar warga pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam mencari solusi yang terbaik.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

7.	Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. Masing-masing pihak mengklaim lahan garapan dengan lokasi terletak di Wilayah Kilo Meter 27 Blok D dan Blok E. Informasi adanya sengketa lahan diperoleh dari pihak kecamatan, sehingga Pemerintah Kabupaten meminta agar Pemerintah Kecamatan bersama pihak keamanan untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk menghindari konflik sosial. sehingga Pada Senin, 29 Mei 2023 bertempat di Polsek Marangkayu dilaksanakan fasilitasi penanganan Sengketa Lahan di Wilayah Kilo Meter 27 Antara Sdr Lasade Cs dengan Sdr Gazali Cs. yang dihadiri camat Marangkayu, Kapolsek marangkayu, Danposramil marangkayu, Kasi Pemerintahan Kecamatan marangkayu dan kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan : 1. Masing-masing pihak sepakat belum mengetahui tapal batas lahan yang digarap yang menjadi obyek permasalahan . 2. Disepakati akan dilakukan pengukuran tapal batas lahan garapan oleh masing² pihak yang terletak di Blok D dan Blok E yang menjadi obyek permasalahan . 3. Disepakati akan dilakukan pengukuran lahan yang menjadi obyek permasalahan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Marangkayu dan Pemerintah Desa Santan Ulu.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa serta pihak kecamatan untuk terus melakukan pendekatan dan mendorong dilakukan mediasi, tidak melakukan penguasaan atau tindakan yang bisa memancing terjadinya konflik. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
----	---	---	---



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

8	Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Desa Loa Duri Ilir Terjadi penolakan warga RT.11 dan RT.26 desa Loa Kulu Ilir Kecamatan Loa Janan atas pembangunan Gereja HKBP (saat ini dalam proses pembangunan), dimana warga menganggap pembangunan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga. 2. mendorong kepada kepala desa dan lembaga-lembaga desa untuk melakukan mediasi. 3. melakukan koordinasi kepada pihak terkait 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
9	Aliansi Masyarakat di Samboja Lakukan Aksi Penutupan Akses Jalan Pertambangan Aliansi Masyarakat Bersatu di Kecamatan Samboja Barat unjuk rasa kepada perusahaan Lembuswana Perkasa (LP) dan PT. Ryan Eka Pratama (PT. REP). untuk melakukan progres penutupan lubang bekas tambang dan sengketa lahan yang belum tuntas dengan permintaan masyarakat. Sebelumnya, telah dilakukan mediasi pertemuan antara masyarakat terdampak dengan pihak perusahaan untuk menemukan win win solution, dan dituangkanlah dalam bentuk berita acara. Namun, dari berita acara tersebut pihak perusahaan belum juga melakukan progres komitmen yang telah disepakati bersama. Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Bukit Merdeka (APLH-BM) Yasir Den Has mengatakan aksi yang terjadi pada Senin (12 Juni 2023) merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam merealisasikan penutupan bekas lubang tambang yang berdekatan dengan permukiman masyarakat, tepatnya berada di Kelurahan Bukit Merdeka.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar warga dengan pekerja. 2. melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

10	Tuntutan Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang terhadap PT. Bayan Group Pemerintah Desa di Kecamatan Tabang, menuntut agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang, tidak hanya di desa Gunung Sari, desa-desa yang lain memerlukan Solar Cell untuk penerangan jalan, banyak jalan-jalan desa dan gedung sekolah yang rusak. Sehingga para pemerintahan desa menyampaikan tuntutan agar PT. Bayan Group dapat memberikan CSR secara merata diseluruh desa di kecamatan Tabang.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan, yang mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan. 2. mendorong DPRD untuk dapat menjembatani pertemuan antara Perusahaan dengan Pemerintahan Desa agar beberapa keinginan bisa diakomodir oleh perusahaan. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
11	Lahan Warga L3 belum digantirugi oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) Warga L3 menuntut kepada Jembayan Muara Bara (JMB) untuk segera melakukan gantirugi lahan-lahan warga desa Mulawarman Dusun Karya Harapan, karena itu warga meminta advokasi kepada Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur untuk menyampaikan keluhan kesah dan tuntutan mereka. Menurut Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur bahwa PT Jembayan Muara Bara atas pemasalahan penyerobotan lahannya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa penyerobotan lahan merupakan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain tanpa mengindahkan konsekuensi hukum dan aturan yang berlaku. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dengan perusahaan. 2. melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti tuntutan warga L3 desa Mulawarman. 3. mendorong kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat surat teguran kepada PT JMB terkait kegiatan PT JMB di lahan masyarakat Desa Mulawarman. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

	Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 dan Pasal 36 telah mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatannya wajib mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
12	Konflik Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura Beredarnya Surat Keputusan (SK) Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Nomor : 001/SK-1/SKKM/X/2023.dikeluarkan 1 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Adji Mohammad Arifin tersebut menetapkan pencabutan gelar bangsawan kesultanan, gelar Pangeran Hario Kesumo Poeger dari Adji Azuar Poeger, dan gelar Pangeran Hario Kesuma Poeger dikembalikan ke keraton. Adji Azuar Poeger mengatakan bahwa dirinya yang diamanahkan oleh Sultan Almarhum Salehuddin II yang memberikan gelar kepada dirinya menggantikan gelar orang tuanya almarhum Adji Pangeran Hario Kesumo Poeger. Konflik bermula dengan adanya surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sultan Adji Mohammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura XXI oleh kerabat keturunan Aji Pangeran Hario Kesumo Poeger bin Adi Mohammad Parikesit.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung kerabat kerajaan. 2. membuat telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, agar Bupati Kutai Kartanegara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil langkah-langkah untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan untuk menjaga kondusifitas daerah dan kehidupan sosial budaya di Kutai Kartanegara. 3. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

13	Konflik Pembebasan Lahan Warga Desa Teluk Bingkai oleh PT. ABK Lahan Warga Desa Teluk Bingkai belum diselesaikan PT. Agro Bumi Kaltim (ABK) sehingga warga menghentikan truk-truk pengangkut hasil sawit. Warga menuntut kejelasan ganti rugi lahan yang digarap oleh PT.ABK, warga meminta mediasi dengan PT.ABK dan PT. Evans Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan warga.	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar pendukung 2. mengkoordinasikan kepada Dinas Perkebunan untuk dapat menindaklanjuti permasalahan dengan mempertemukan perusahaan dengan warga. 3. Meminta kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengumpulkan data bukti pendukung kepemilikan lahan, dan meminta masyarakat tidak berbuat anarkis dan melanggar hukum 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.
14	Klaim Lahan dilokasi SMP YPK Tenggarong Lahan SMP YPK Tenggarong yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Panji Tenggarong diklaim oleh Ahli Waris Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid menuntut kepada pihak Yayasan SMP 1 YPK agar mengosongkan lahan yang di klaim sebagai milik ahli Waris dari bapak Alm. Abd. Majid M, Gufran Majid Perkara yang dimenangkan Ahli Waris berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung RI putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3278/PDT/1996 tanggal 27 Juni 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 1996. sangat mutlak hak sepenuhnya Ahli Waris. berdasarkan putusan tersebut, dengan ukuran 50m x 133m = 6,650 M2 Ahli waris menuntut pembayaran gantirugi lahan kepada pembuat sertifikat diatas lahan tersebut yakni SMP YPK dan 20 nama pemilik sertifikat diatas lahan milik ahliwaris. hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada	1	1. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi konflik antar warga dan ahliwaris 2. mengkoordinasikan kepada pihak terkait dengan proses mediasi. 3. Meminta satpol PP dapat mengawasi semua pergerakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 4. Melakukan monitoring secara berkala dan kerjasama intelijen untuk mengetahui kondisi aktual.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Rekapitulasi Data Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)						2							2
2	Penanganan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA	1											1	2
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat													0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara													0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						4							4
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial			2										0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)													0
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan													-
	- Melibatkan Ormas/LSM													-
	- Hanya Kelompok Masyarakat			2		1	1				2			6
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik							1						1
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal													
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal			1					1					2
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat	1	1	3										5
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter													0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha													0



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA	1			1									2
16	Rakor Tim Pakem Kukar												1	1
17	Rakor Penanganan Konflik													
	- Politik													0
	- Lahan SDA / Pertambangan													0
	- Kewaspadaan													0
	- Sosial Budaya			1	2									3
	- Ketenaga Kerjaan													0
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		6	6	7	4	1	6	1	2	0	2	0	2	31

Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Konflik Pilkades								1					1
2	Sengketa Partai Politik dan Pemilu	1					1	1						3
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	1,78%	1,41%	1,64%	2,19%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	0,96%	1,25%	1,77%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme



sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa

5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarnya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparaturnya dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan yang dilakukan di 20 kecamatan yaitu Pembinaan Pembauran Masyarakat, Pembinaan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan, serta sosialisasi FPK dan KPU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis. Dalam hal pencapaian pada indikator ini yang merupakan hal mendasar adalah pada tingkat kehadiran dan pemahaman peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan.



Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi



ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesbangpol menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukkan negative dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparaturnya Badan Kesbangpol dalam 2 tahun berturut-turut, dengan harapan para aparaturnya bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara :

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293



Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 293 kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus dari tahun 2022 dengan target jumlah kasus sebanyak 282 kasus, penurunan kasus ini merupakan suatu capaian yang cukup baik, untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Selain penyakit masyarakat, dalam hal ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB se – Kaltim serta sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah dan Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2021	2022	2023
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	11,04%	11,90%	14,76%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	7,9%	8,8%	9,8%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada tahun 2023, sementara 1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari dua indikator tersebut :

a. Indikator 1 : Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2020 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2019 sebesar 81,24 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang



tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

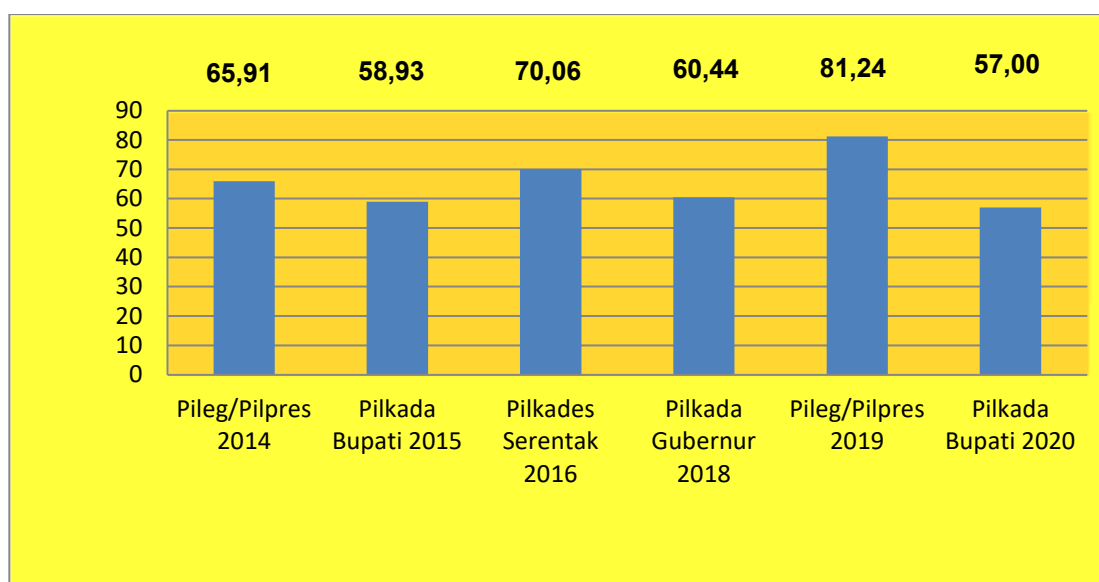


RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpres 81,24	Pilbup 57,00

**GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Terkait dengan parpol pada fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2023, seluruh parpol telah diverifikasi dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dan persyaratan verifikasi. Pada tahun 2019 proses bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan bagi parpol hasil Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) Parpol.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PERIODE 2019-2024

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 Kursi	34.286 Suara	130.286.800	Lengkap
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7 Kursi	46.667 Suara	177.334.600	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7 Kursi	45.361 Suara	172.371.800	Lengkap
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13 Kursi	95.345 Suara	362.311.000	Lengkap
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 Kursi	20.373 Suara	77.417.400	Lengkap
6.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3 Kursi	23.250 Suara	88.350.000	Lengkap
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Kursi	14.340 Suara	54.492.000	Lengkap
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi	16.764 Suara	63.703.200	Lengkap
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 Kursi	34.071 Suara	129.469.800	Lengkap
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 Kursi	12.410 Suara	47.158.000	Lengkap
JUMLAH		45 Kursi	342.867 Suara	1.302.894.600	



Dari 16 Partai Politik pada 2019 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, ada 10 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2023.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 100%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh Parpol. Agar parpol dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada tahun berikutnya.

b. Indikator II : Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 9,9% dengan realisasi 9,8%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar sama dengan tahun 2022 sebanyak 17 ormas dan 21 ormas pada tahun 2023, meskipun demikian, ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Badan Kesbangpol memiliki tugas untuk



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2018 – 2023

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

**Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar Tahun 2023
(berdasarkan sebaran di kecamatan)**

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Lemb. Adat	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	2	-	-	-	-	-	-	0
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	1	-	-	-	-	-	-	0
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	1	-	0
10	Tenggarong	11	-	-	-	1	-	4	21
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	1	0
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	14	0	0	0	1	1	5	21



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,50 Nilai	42,75	64,88%
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	3,99%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	5,71%	100%



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai	95,20 Nilai	100	11.993.973.109	10.899.491.663	90,87
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	2.777.086.056	1.877.173.360	67,60
Sasaran Strategis III :				Program :		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	2,19%	123	2.012.630.000	1.948.079.962	96,79
				Program :		
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,21%	1,77%	146	3.782.286.000	2.850.290.849	75,36
Sasaran Strategis IV :				Program :		
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%	14,76%	127	44.517.786.507	43.195.733.971	97,03
				Program :		
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	9,9%	9,8%	98,99	298.000.000	215.500.000	72,32



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Periode pembangunan tahun 2021 s/d 2026, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data kinerja layanan yang secara rinci telah dikemukakan diatas dan data LPPD Kutai Kartanegara 2022. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan dilakukan pada tahun 2021, pembinaan politik di daerah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 13 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka pendidikan politik pada tahun 2021, kegiatan ini diharapkan akan membawa hasil yakni peningkatan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan untuk tahun 2022 hingga 2024 capaian diharapkan bisa bertahan atau bahkan meningkat walaupun sesuai Permendagri 18 tahun 2020 Badan Kesbangpol tidak terdapat IKK sebagaimana biasanya, namun Badan Kesbangpol tetap akan melakukan pengukuran sesuai dengan indikator yang ada sedangkan untuk pembinaan ormas juga meningkat walaupun terdapat regulasi yang membatasi dan untuk 2022 dan 2023 diharapkan akan sesuai dengan target pada renstra dengan didukung pendanaan yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan. Selengkapnya dapat disampaikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:													
	Indikator Tujuan:													
1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol			Nilai	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	41,85	42,75	63,75	64,00	target tidak tercapai
2	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):													
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol			Nilai	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	41,85	42,75	63,75	64,00	target tidak tercapai
2	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejala			Kejadian	28	25	24	20	17	26	14	24	20	target tercapai
3	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas			Persen	2,68	2,99	3,33	3,63	3,92	2,9	3,99	3,33	3,63	capaian melebihi target
4	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi			Persen	4,4	4,5	5,53	5,62	5,71	4,6	5,71	5,53	5,62	capaian melebihi target
II	INDIKATOR PROGRAM:													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	86	87	88	89	90	86,16	95,2	88	89	capaian melebihi target
2	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
3	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah			Persen	11,36	11,62	14,27	14,51	14,75	11,90	14,76	14,27	14,51	capaian melebihi target
4	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			Persen	1,59	1,78	1,99	2,17	2,34	1,64	2,19	1,99	2,17	capaian melebihi target
5	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud			Persen	1,09	1,21	1,33	1,45	1,58	1,25	1,77	1,33	1,45	capaian melebihi target
6	Persentase ormas yang tertib administrasi			Persen	8,9	9,9	11,4	12,9	14,4	8,8	9,8	11,4	12,9	target tidak tercapai

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen/Triwulan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	target tercapai
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	20	20	30	30	30	17	21	30	30	target tidak tercapai


 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
2	Situasi keamanan daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

			2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
3		Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
4		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

			masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
--	--	--	---

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

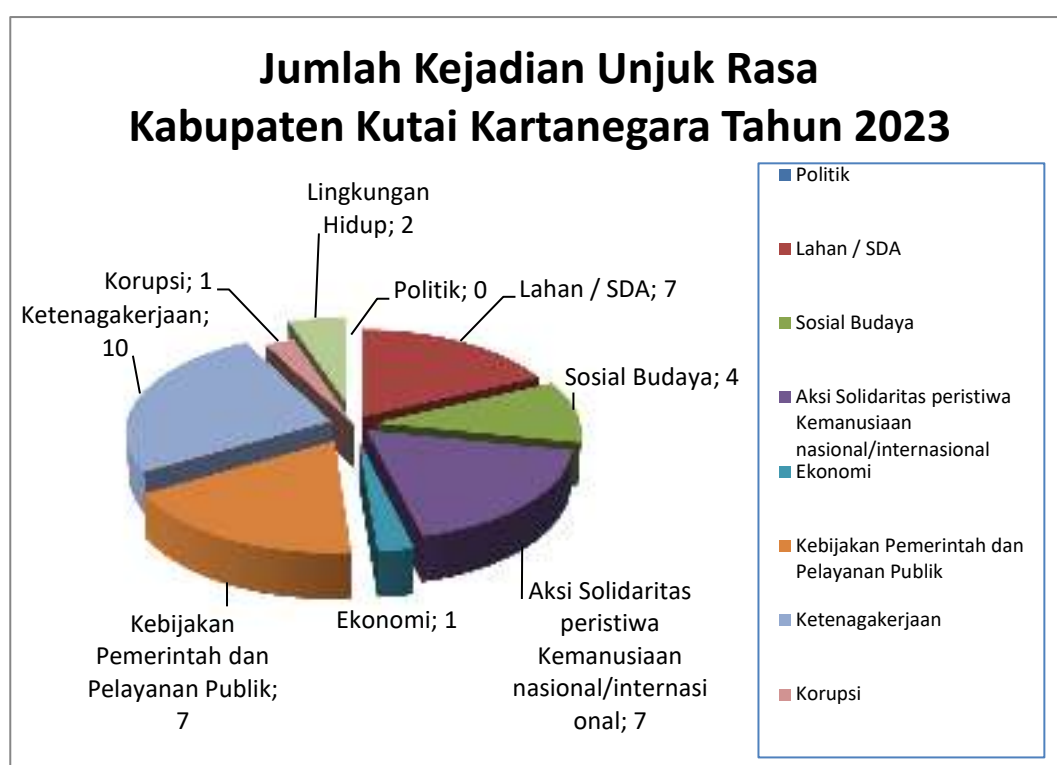
1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol
 - d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2018	2019	2020	2021	2022
B	BB	BB	A	AA

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat





RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2021 – 2023

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023
1	Narkoba	224	178	239
2	Pembunuhan	3	3	-
3	Kejahatan Seksual	1	3	2
4	Penganiayaan	22	32	15
5	Pencurian	17	36	16
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	24	25	15
7	Premanisme	0	5	6
	JUMLAH	291	282	293

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2018 – 2023

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14
2.	OKP	-	-	-	-	4	
3.	LSM	-	2	-	2	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun



terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada



masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum



Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.



2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat



lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya

peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan



meningkatnya kinerja aparaturnya Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang



rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum

- B. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- C. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- D. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
- E. Penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara
- F. Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan, melalui penguatan forum-forum bentukan pemerintah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, Badan Kesbangpol akan menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan



Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik serta sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Untuk rumusan seluruh permasalahan beserta Langkah tindak lanjut tergambar pada tabel sebagai berikut :

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	2	3	4	5	6
1	Situasi kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat	Pemerintah memfasilitasi seluruh stake holders terkait dalam suatu Forum/Tim dalam penyelesaian berbagai konflik dan gejolak yang timbul serta perlunya upaya monitoring dan penyajian analisis yang akurat terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
2			Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3			Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
6		Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi	Pelaksanaan Program Paskibraka dan Purna Paskibraka dan Duta Pancasila sebagai upaya pendidikan wawasan dan pancasila kepada generasi muda	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
7			Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat	Pemerintah melaksanakan program pendidikan wawasan kebangsaan dan melakukan sosialisasi dan melaksanakan ToT bagi para pengajar tentang wawasan kebangsaan dan pancasila serta sosialisasi dan penyuluhan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8			Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Pemerintah melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan kegiatan yang positif bagi para pemuda khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
9			Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan	Pemerintah melakukan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat yang ada terhadap segala aspek ormas tersebut	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
			Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
10			Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam bidang politik	Pemerintah melakukan upaya pendidikan politik bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	2	3	4	5	6
11			Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi	Melakukan upaya monitoring terhadap perkembangan kehidupan politik di Kab. Kukar		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
12		Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan pengurus partai politik		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Pada rancangan RKPD tahun 2025 telah ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah 2025 dimana Badan Kesbangpol termasuk pada prioritas kedua yaitu “Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil”. Dalam rancangan awal ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol di dalam rancangan RKPD 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prioritas 2 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil

PRIORITAS DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN	POKOK BAHASAN	PERMASALAHAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting	penguatan forum Masyarakat dan Belum adanya informasi terkait kemiskinan dan Stunting dari OPD Pengampu yang nantinya bisa dilaksanakan oleh Forum-forum di bawah koordinasi Badan Kesbangpol	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%
				Program	Persentase	2,17%



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	12,90%
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penguatan kewaspadaan dini dalam kehidupan kemasyarakatan di lokasi sekitar IKN	pemberdayaan masyarakat terkait kewaspadaan dini potensi konflik di lokasi sekitar IKN	penguatan kewaspadaan dini	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Rancangan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada tahun 2025 yang dilakukan sesuai prioritas Badan Kesbangpol sebagai berikut :

No	Prioritas OPD	Keterangan
1	Penguatan Forum-Forum Bentuk Pemerintah melalui Pemberdayaan Masyarakat	FPK, FKUB, FKDM DAN JPM
2	Penciptaan Iklim Demokratis dan Kondusif Pasca Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024	• Penguatan Pendidikan Politik ke seluruh lapisan aparatur dan Masyarakat • Pengutan Deteksi Dini Kejadian Konflik • Peningkatan besaran Bankeu Parpol
3	Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan Purna Paskibraka	Pembentukan Duta Pancasila
4	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pencegahan Paham Radikalisme	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan
5	Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan dan tes urine
6	Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Dari penjabaran rancangan RKPD tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif antara Rancangan dan Rancangan Akhir yang disebabkan oleh acuan ketersediaan pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang program dan kegiatan.

Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat disampaikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	12.065.355.070,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89	12.808.529.350,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	130.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	750.000.000,00	
1						PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	
2						PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	
3						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150.000.000,00	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.666.032.208,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.858.211.273,00	
6						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	25.000.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.692.571.273,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	128.760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	40.800.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	105.000.000,00	
10						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25.000.000,00	
11						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	30.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	466.296.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	168.552.000,00	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	186 paket	366.296.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 paket	148.552.000,00	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	20.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	930.243.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layanan	468.393.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	50.000.000,00	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	25.000.000,00	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	38.150.000,00	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	700.243.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	300.243.000,00	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	250.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1.680.000.000,00	
21						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	1.280.000.000,00	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
22						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	320.000.000,00	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	250.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	80.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.171.983.862,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	508.373.077,00	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	202.959.076,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	126.589.669,00	

NO	RANCANGAN RKPd/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	968.024.786,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	380.783.408,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	410.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	270.000.000,00	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,17%	8.000.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,17%	6.050.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	8.000.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	6.050.000.000,00	
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.800 orang	7.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.400 orang	5.550.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 orang	500.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 orang	500.000.000,00	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%	4.831.992.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,51%	4.331.992.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.831.992.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	4.331.992.000,00	
33	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	500.000.000,00	Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparaturn desa/kelurahan dan RT

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 orang	3.581.992.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 orang	3.581.992.000,00	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024
35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	12,90%	700.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	12,90%	700.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	840 orang	700.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	840 orang	700.000.000,00	Facilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%	2.100.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,45%	1.202.429.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	2.100.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	1.202.429.000,00	
37	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.800 orang	1.800.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.300 orang	902.429.000,00	Facilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba
38	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 laporan	300.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 laporan	300.000.000,00	Facilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.000 orang	1.200.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	700.000.000,00	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini
40	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.500.000.000,00	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat
JUMLAH					30.397.347.070,00	JUMLAH				27.292.950.350,00	

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesbangpol tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang masuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan



hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2025 mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Dari visi dan agenda pembangunan tersebut, dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun agenda pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN tahun 2020 – 2024 tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari agenda pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 4 dan 7.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegaskan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	Masih kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan 2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara

Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Tabel 3.1
TUJUAN OPD

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol
		2. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang diselesaikan



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

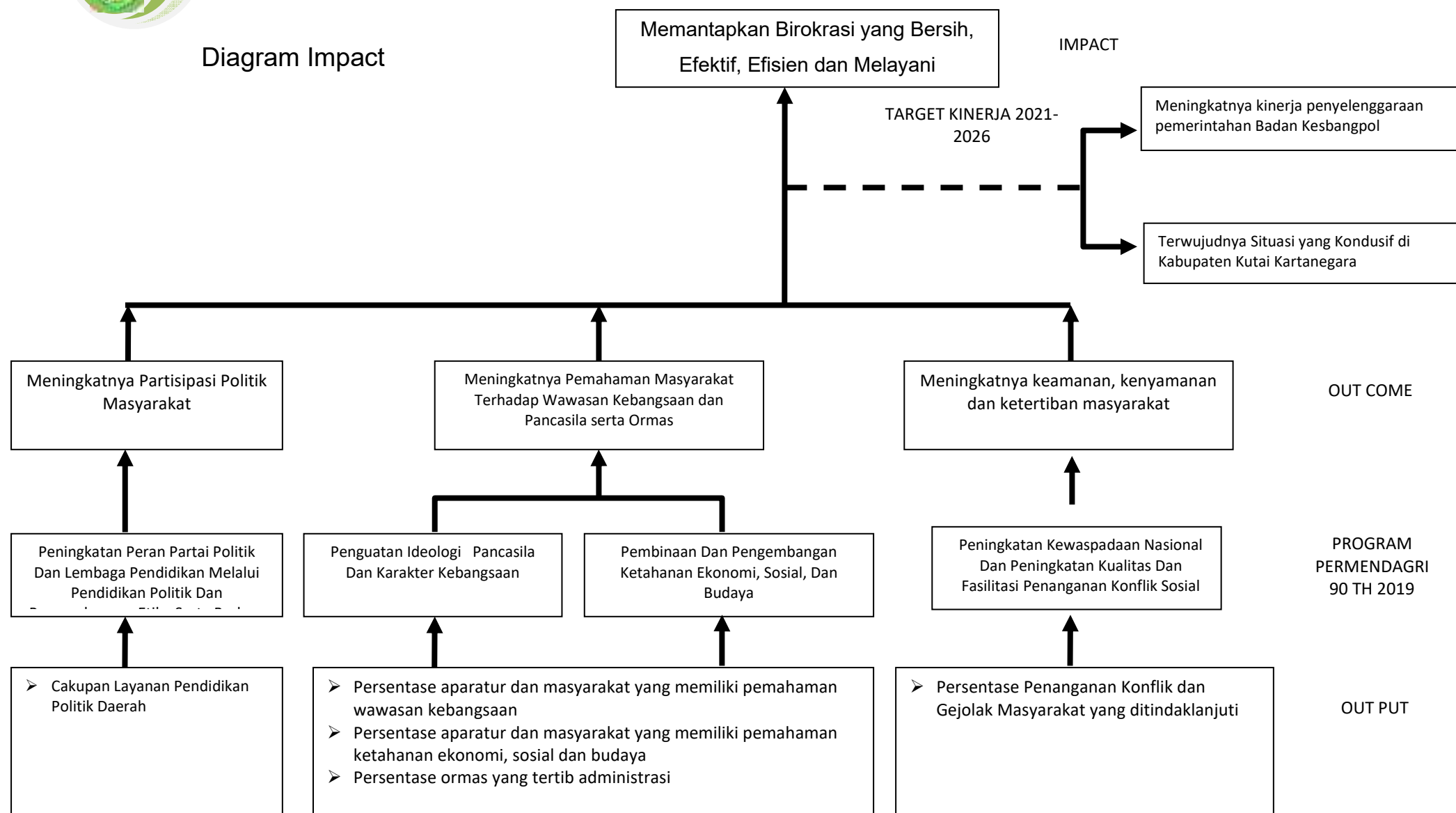
Tabel 3.2
SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	2. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak
	3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas
	4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Diagram Impact





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Cara Hitung
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,00 nilai	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	20 kali	Jumlah konflik dan gejolak yang terjadi
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	3,63%	Jumlah masyarakat dan aparatur yang paham wasbang dan pancasila serta ormas dibagi Jumlah masyarakat kukar yang memenuhi syarat/DPT
4	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,62%	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang paham Terhadap Demokrasi dibagi Jumlah penduduk yang memenuhi syarat/yang masuk dalam DPT



a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 dan pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana yang telah termuat pada Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026, sehingga pada tahun anggaran 2025 dalam perumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan, terutama lahan pada lokasi Ibu Kota Nusantara
3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah (FKUB, FPK dan FKDM) serta Jejaring Panca Mandala dan organisasi lainnya
9. Walaupun tidak terdapat pemilu pada tahun 2025, Badan Kesbangpol tetap berkomitmen melakukan Pendidikan politik kepada seluruh lapisan Masyarakat.
10. Adanya peraturan baru terhadap pelaksanaan fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan pembentukan Duta Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol
11. Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, melalui Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka diperlukan penyesuaian pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 dan Rencana kerja tahunan tahun 2025 dan target kegiatan tahun 2025 banyak mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya serta



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

sub kegiatan. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan

Kemudian penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2025 disesuaikan dengan Rancangan RKPD tahun 2025 yang memuat program prioritas dan program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana dalam hal tersebut Badan Kesbangpol termasuk sebagai OPD pendukung dalam 2 (dua) program dedikasi sebagai berikut :

1. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)

Terkait dengan program tersebut Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Badan Kesbangpol

2. Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)

Dalam program ini Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Sekretariat Kabupaten yang memiliki tugas untuk menginventarisir rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Badan Kesbangpol memberikan dukungan berupa pelaksanaan fasilitasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap pendirian



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

rumah-rumah ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut Badan Kesbangpol telah terakomodir ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol untuk perencanaan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2025

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejala di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam		
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitas	Peningkatan upaya	Peningkatan	Cakupan



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	Layanan Pendidikan Politik Daerah
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah	Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol	Etika Serta Budaya Politik	
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

		Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	pemahaman ketahanan ekososbud
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika	3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase ormas yang tertib administrasi
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD, hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021
2. Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

3. Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak
4. Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol
5. Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai pembangunan
6. Penambahan biaya cetak NCR
7. Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
8. Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
9. Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum
10. Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
11. Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional
12. Fasilitas Kegiatan Paskibraka, Fasilitas FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku
13. Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
14. Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT
15. Fasilitas kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024
16. Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
17. Fasilitas dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
18. Fasilitas FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkoba dan pembelian tes kit narkoba



19. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi

20. Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini

untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :

a. Prioritas 1

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

b. Prioritas 2

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d) Tabel rencana program dan kegiatan

Adapun perincian kegiatan tahun 2025 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		89	12.808.529.350,00	APBD II		90	10.058.095.208,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	750.000.000,00	APBD II		6 dokumen	130.000.000,00
1	8.01.01.2.01.01	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Panji	1 dokumen	50.000.000,00	APBD II		-	-
1	8.01.01.2.01.01	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 berita acara	50.000.000,00	APBD II		-	-
1	8.01.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 laporan	150.000.000,00	APBD II		-	-
1	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	3 dokumen	450.000.000,00	APBD II		3 dokumen	50.000.000,00
2	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	50.000.000,00	APBD II		3 laporan	80.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20 laporan	8.858.211.273,00	APBD II		20 laporan	8.652.912.208,00
3	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	900 orang/bulan	8.692.571.273,00	APBD II		900 orang/bulan	8.517.272.208,00
1	8.01.01.2.02.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
4	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	25.000.000,00	APBD II		1 laporan	20.000.000,00
5	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tenggarong, Panji	18 laporan	115.640.000,00	APBD II	Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol	18 laporan	115.640.000,00
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 dokumen	105.000.000,00	APBD II		3 dokumen	40.800.000,00
2	8.01.01.2.03.05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
5	8.01.01.2.03.05	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	50.000.000,00	APBD II		-	-
6	8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	30.000.000,00	APBD II		3 laporan	40.800.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	168.552.000,00	APBD II		4 dokumen	20.000.000,00
7	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong, Panji	186 paket	148.552.000,00	APBD II	Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak	75 orang	20.000.000,00
8	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong, Panji	75 orang	20.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol	75 orang	20.000.000,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 layanan	468.393.000,00	APBD II		6 layanan	478.383.000,00
9	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	4 paket	5.000.000,00	APBD II		4 paket	5.000.000,00
10	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	29 paket	50.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai pembangunan	29 paket	50.000.000,00
11	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	38 paket	25.000.000,00	APBD II		38 paket	25.000.000,00
12	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	5 paket	38.150.000,00	APBD II	penambahan biaya cetak NCR	5 paket	40.000.000,00
13	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	450 laporan	300.243.000,00	APBD II	Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	225 laporan	308.383.000,00
14	8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Panji	2500 dokumen	50.000.000,00	APBD II		2500 dokumen	50.000.000,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	1.680.000.000,00	APBD II		100%	90.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	4 unit	1.280.000.000,00	APBD II	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID	-	-
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	1 unit	320.000.000,00	APBD II	Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID	-	-
15	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 unit	80.000.000,00	APBD II		10 unit	90.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	508.373.077,00	APBD II		12 bulan	508.383.077,00
16	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	12 laporan	1.000.000,00	APBD II		12 laporan	1.000.000,00
17	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 laporan	126.589.669,00	APBD II	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum	12 laporan	126.599.669,00
18	8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	24 laporan	380.783.408,00	APBD II	Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan	12 laporan	380.783.408,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	270.000.000,00	APBD II		100%	290.000.000,00
19	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong, Panji	30 unit	70.000.000,00	APBD II		30 unit	80.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong, Panji	40 unit	110.000.000,00	APBD II	penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional	40 unit	110.000.000,00
21	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong, Panji	43 unit	40.000.000,00	APBD II		43 unit	50.000.000,00
22	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong, Panji	2 unit	50.000.000,00	APBD II		2 unit	50.000.000,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		2,17%	6.050.000.000,00	APBD II		2,34%	650.000.000,00
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		12 dokumen	6.050.000.000,00	APBD II		12 dokumen	650.000.000,00
23	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	1.800 orang	5.550.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitas FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku	500 orang	400.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (Ia kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	600 orang	500.000.000,00	APBD II	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan	300 orang	250.000.000,00
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah		14,51%	4.331.992.000,00	APBD II		14,75%	1.802.894.600,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		12 dokumen	4.331.992.000,00	APBD II		12 dokumen	1.802.894.600,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	2.000 orang	500.000.000,00	APBD II	Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT	460 orang	250.000.000,00
26	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	48 orang	3.581.992.000,00	APBD II	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024	48 orang	1.402.894.600,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	24 laporan	250.000.000,00	APBD II	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah	24 laporan	150.000.000,00
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi		12,90%	700.000.000,00	APBD II		14,40%	200.000.000,00
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		30 dokumen	700.000.000,00	APBD II		30 dokumen	200.000.000,00
28	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	840 orang	700.000.000,00	APBD II	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas	90 orang	200.000.000,00
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud		1,45%	1.202.429.000,00	APBD II		1,58%	630.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		5 dokumen	1.202.429.000,00	APBD II		5 dokumen	630.000.000,00
29	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	1.800 orang	902.429.000,00	APBD II	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba	600 orang	500.000.000,00
30	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	35 laporan	300.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi	18 Laporan	130.000.000,00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	2.200.000.000,00	APBD II		100%	1.900.000.000,00
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12 dokumen	2.200.000.000,00	APBD II		12 dokumen	1.900.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	1.000 orang	700.000.000,00	APBD II	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini	300 orang	400.000.000,00
32	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	50 dokumen	1.500.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejolak masyarakat	50 dokumen	1.500.000.000,00
		JUMLAH				27.292.950.350,00				15.240.989.808,00

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



BAB V

P E N U T U P

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2025. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2025, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2021 – 2026 khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2024 secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

Rancangan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada tahun 2025 yang dilakukan sesuai prioritas Badan Kesbangpol sebagai berikut :

No	Prioritas OPD	Keterangan
1	Penguatan Forum-Forum Bentuk Pemerintah melalui Pemberdayaan Masyarakat	FPK, FKUB, FKDM DAN JPM
2	Penciptaan Iklim Demokratis dan Kondusif Pasca Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024	• Penguatan Pendidikan Politik ke seluruh lapisan aparatur dan Masyarakat • Penguatan Deteksi



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

		Dini Kejadian Konflik • Peningkatan besaran Bankeu Parpol
3	Pelaksanaan Tugas Paskibraka dan Purna Paskibraka	Pembentukan Duta Pancasila
4	Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pencegahan Paham Radikalisme	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan
5	Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh kecamatan dan tes urine
6	Penguatan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi dan Pengawasan Ormas serta Ormas Award

B.Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Renja Badan Kesbangpol tahun 2025 melalui



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.

3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD, hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021
2. Penambahan besaran dana pengelola keuangan Badan Kesbangpol
3. Penambahan Sub Kegiatan utk Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan ASN Kesbangpol yang sudah rusak



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

4. Penambahan untuk biaya kontribusi mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesbangpol
5. Penambahan untuk kegiatan pameran dan pawai pembangunan
6. Penambahan biaya cetak NCR
7. Penambahan utk keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
8. Penambahan utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID
9. Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum
10. Penambahan utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
11. Penambahan untuk sewa kendaraan dinas operasional
12. Fasilitas Kegiatan Paskibraka, Fasilitas FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku
13. Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
14. Penambahan untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT
15. Fasilitas kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024
16. Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah
17. Fasilitas dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
18. Fasilitas FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkoba dan pembelian tes kit narkoba
19. Fasilitas Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi
20. Fasilitas FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini

untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



b. Prioritas 2

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, Agustus 2024

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,**

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226200112 2 002